



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/KEPMEN-KP/2014

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014.

- KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.
- KETIGA : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2013 akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2014.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
7.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.22/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemungutan PNBPN pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang Berasal Dari Pungutan Perikanan													
8.	Peraturan Menteri	Kartu Nelayan													
9.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Perikanan Tangkap Perairan Umum													
10.	Peraturan Menteri	Sistem Moratorium Wilayah Penangkapan Ikan													
11.	Peraturan Menteri	Usaha Penangkapan Ikan Hias													

2. DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Pemerintah	Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan													
2.	Peraturan Menteri	Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan													
3.	Peraturan Menteri	Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia													
4.	Peraturan Menteri	Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan													
5.	Peraturan Menteri	Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik													

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
6.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja UPT Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut												
7.	Peraturan Menteri	Sertifikasi Benih Ikan dan Rumput Laut												
8.	Peraturan Menteri	Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik												
9.	Keputusan Menteri	Klasifikasi Obat Ikan												

3. DITJEN P2HP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia												
3.	Peraturan Menteri	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Standardisasi Produk Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Larangan Pengeluaran Ikan Hias Tertentu dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia												
6.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
7.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia													
8.	Keputusan Menteri	Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan													
9.	Keputusan Menteri	Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan													
10.	Keputusan Menteri	Komisi Hasil Perikanan													

4. DITJEN PSDKP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Pemerintah	Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara													
2.	Peraturan Pemerintah	Pengawasan Perikanan													
3.	Peraturan Menteri	Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan													
4.	Peraturan Menteri	Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan													
5.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan SDKP													

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
6.	Peraturan Menteri	Pakaian Dinas dan Atribut Polsus PWP3K												
7.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan												
8.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan												

5. DITJEN KP3K

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
		Sanksi Administratif Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
2.	Peraturan Presiden	Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil												
3.	Peraturan Presiden	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing												
4.	Peraturan Menteri	Penetapan Batas Sempadan Pantai												
5.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
6.	Peraturan Menteri	Perencanaan WP-3-K													
7.	Peraturan Menteri	Jejaring Kawasan Konservasi Perairan													
8.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan													
9.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan													
10.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Penelitian dan Pendidikan													
11.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Konservasi Jenis Ikan Untuk Perdagangan													
12.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Konservasi Jenis Ikan Untuk Pengembangbiakan													
13.	Peraturan Menteri	Tata Cara Perubahan dan Fungsi Zona Inti													
		Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Izin serta Perubahan Status Zona Inti													
14.	Peraturan Menteri	Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil													
15.	Peraturan Menteri	Tata Cara Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil													
16.	Peraturan Menteri	Standar Operasional Prosedur Penanggulangan dan Ganti Kerugian Dampak Tumpahan Minyak di Laut pada Sumberdaya Perikanan													

6. INSPEKTORAT JENDERAL

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP												
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup KKP												

7. BALITBANG KP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Presiden	Penyelenggaraan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil												
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia												
3.	Peraturan Menteri	Peta Perikanan Umum Daratan												
4.	Peraturan Menteri	Estimasi Potensi Status Pemanfaatan Sumber Daya Ikan, dan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan di WPPNRI												
5.	Keputusan Menteri	Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan KKP												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
6.	Keputusan Menteri	Sentra HKI KKP													

8. BPSDM KP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Fungsional Penyuluh Perikanan													
2.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Profesi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan													
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan													
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan P2MKP													

9. BKIPM

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan													
2.	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa yang Tergolong Benda Lain Berupa Bahan Patogenik													

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan													
4.	Peraturan Menteri	Penerapan Ketelusuran (Traceability) Pada Hasil Perikanan													
5.	Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK													
6.	Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Jenis-Jenis HPIK, Media Pembawa dan Sebarannya													

10. BIRO UMUM

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP													
2.	Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.60/MEN/2011 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan KKP dan Keputusan Menteri Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan KKP													

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Keputusan Menteri	Juknis Tata Naskah Dinas Elektronik													
4.	Keputusan Menteri	Juknis Pengelolaan BMN													

11. BIRO KEPEGAWAIAN

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan													
2.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan													
3.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan													
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Penilaian Pejabat Fungsional Berprestasi													
5.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Evaluasi Atas Penilaian dan PAK Jabatan Fungsional Lingkup KKP													
6.	Peraturan Menteri	Pakaian Seragam													
7.	Keputusan Menteri	Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Lingkup KKP													

12. BIRO PERENCANAAN

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang KP Tahun 2015													
2.	Peraturan Menteri	Lingkup Urusan Pemerintah Bidang KP Tahun 2015 yang dilimpahkan ke Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan													
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015													
4.	Peraturan Menteri	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan PNPM KP													
5.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KKP													
6.	Peraturan Menteri	Pedoman Penetapan Target dan Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan													
7.	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Minapolitan KKP													
8.	Peraturan Menteri	Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di KKP													
9.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi KKP													
10.	Peraturan Menteri	Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender KKP													

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL													
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
11.	Peraturan Menteri	Rencana Startegis KKP Tahun 2015-2019														
12.	Peraturan Menteri	Rencana Kerja (RENJA) KKP Tahun 2015														
13.	Peraturan Menteri	Ekonomi Biru														
14.	Peraturan Menteri	<i>E-Budgeting</i>														
15.	Keputusan Menteri	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP Tahun 2015-2019														
16.	Keputusan Menteri	Pedoman Umum Penyusunan Manajemen Resiko di Lingkungan KKP														
17.	Keputusan Menteri	Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KKP														
18.	Keputusan Menteri	Standar Penilaian Kinerja Organisasi														

13. BIRO KEUANGAN

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL													
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Penatausahaan Persediaan dan Kodifikasi Lingkup KKP														
2.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Barang Milik Negara dan Kodifikasi Lingkup KKP														
3.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Lingkup KKP														

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
4.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut KKP Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK													

14. Biro Hukum dan Organisasi

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat													

15. PUSDATIN

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Statistik dan Angka Kreditnya													
2.	Peraturan Menteri	Master Plan Sistem Informasi KKP													
3.	Peraturan Menteri	Tata Kelola Sistem Informasi KKP													
4.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Aplikasi Sistem Informasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan													
5.	Keputusan Menteri	Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Kelautan dan Perikanan													

16. PUSKITA

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Kerja Sama Internasional di Lingkungan KKP													
2.	Peraturan Menteri	Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan													
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Standardisasi Pelayanan Publik													
4.	Peraturan Menteri	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]
Hanung Cahyono